

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUKURAN BIDANG TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU

**Fahrul, Hasbullah dan Nawawi Natsir**

*fahrulemre@gmail.com*

*Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako*

## **Abstract**

*The purpose of this study was to find out and analyze the implementation of the policy of measuring land parcels at The Palu City Land Office. This research is a qualitative method research with four informants selected. Data collection using observation, interview and documentation techniques. Data analysis techniques used are (1) Data Collection (2) Data Reduction (3) Data Pretentation (4) Data Verivication (5) Conclusion. Theory used in this study are Van Meter dan Van Horn theory that's on (Subarsono, 2005), that's theory measures policy implementation with: (1) Standards and targets (2) Resource (3) Comunicación (4) Characteristics of implementing agents (5) Social, economic and political conditions (6) Disposition. Based on the results of research and analysis conducted by researchers, it can be concluded that the implementation of a land measurement measurement policy has not gone well. That's can be described as follows: (1) The implementation of the policy of measuring land parcels in The Palu City Land Office is seen from the standard factors and the policy objectives have been going well. (2) The implementation of the Land Measuring policy at the Palu City Land Office as seen from the Resource factor has not gone well, this can be seen from inadequate facilities and infrastructure and the number of employees who are still lacking in the Palu City Land Office. (3) The implementation of the Land Measurements policy at the Palu City Land Office in terms of merit factors, characteristics, socio-economic and political conditions and disposition factors has not gone well, this can be seen from the inadequate facilities provided and supported by interviews with informants conducted at the research sites.*

**Keywords:** *Standards and targets, Resource, Comunicación, Executor, Social, economic, political and disposition conditions*

## **PENDAHULUAN**

Kantor Pertanahan Nasional merupakan lembaga Negara yang diberi wewenang untuk mengatur Pertanahan di Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional, sebagai lembaga negara yang ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan di bidang pertanahan. Bagi bangsa Indonesia, tanah merupakan unsur vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi. Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kesatuan tanah air dari keseluruhan Bangsa Indonesia. Pemerintah

Republik Indonesia melalui BPN RI menyusun strategi dan kebijakan pertanahan nasional yang secara fundamental mampu menciptakan struktur sosial dan tatanan politik nasional yang lebih kokoh dan sesuai dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia, (Nurdin, 2016: 1).

Negara Republik Indonesia menyadari bahwa tanah merupakan salah satu kebutuhan primer bagi manusia bahkan sampai meninggal dunia pun manusia masih membutuhkan tanah. Kebutuhan manusia terhadap tanah dewasa ini makin meningkat. Hal ini disebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk, sementara disisi lain luas tanah tidak bertambah. Tanah mempunyai posisi yang sangat strategis dalam kehidupan

masyarakat Indonesia yang bersifat agraris. Sedemikian istimewanya tanah dalam kehidupan masyarakat Indonesia terlihat dalam sikap bangsa Indonesia yang memberikan penghormatan kepada kata tanah, dengan penyebutan istilah Tanah air, Tanah tumpah darah dan Tanah pusaka.

Menyadari nilai dan arti pentingnya tanah, maka para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia merumuskan tentang tanah dan sumber daya alam secara ringkas dan sangat filosofis di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat (3) Bumi dan air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Nurlisa 2015: 1).

Peraturan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat (1) menguraikan pengukuran bidang tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang berkaitan dengan implementasi kebijakan bidang tanah.

Implementasi kebijakan pengukuran bidang tanah dilakukan harus berdasarkan Standar Operasional Prosedur dalam rangka tercapainya jaminan dan kepastian hukum hak-hak atas tanah. Pengelolaan tanah dengan mengadakan pengukuran, pemetaan tanah dan penyelenggaraan tata usaha hak atas tanah merupakan hubungan hukum orang atau badan hukum dengan sesuatu benda yang menimbulkan kewenangan atas obyek bidang tanah dan memaksa orang lain untuk menghormatinya akibat dari pemilikan.

Kantor pertanahan menyelenggarakan pendaftaran tanah yang berfungsi untuk mengetahui status bidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya, untuk apa dipergunakan. Untuk memperoleh kekuatan hukum rangkaian kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis, pengajuan kebenaran materiil pembuktian data fisik dan data yuridis hak atas tanah, ataupun lain hal yang dibutuhkan sebagai dasar hak pendaftaran tanah, dan riwayat asal usul pemilikan atas tanah, jual-beli, warisan, tidak terlepas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendaftaran tanah yang dilakukan secara sistematis sampai saat ini masih dianggap belum maksimal dan prosedural dalam masyarakat, walaupun sebelum dilakukan pengukuran oleh tim teknis telah dilakukan pematokan awal oleh para pemilik tanah. Kota Palu sebagai salah satu kota yang sedang berkembang di Indonesia, masyarakatnya juga memiliki hubungan erat dengan tanah. Tanah merupakan sumber kehidupan sekaligus aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu setiap tanah yang dimiliki masyarakat butuh pengakuan atas kepemilikan tanah tersebut.

Peranan dari Kantor Pertanahan Kota Palu dalam melakukan pengelolaan tanah harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur sehingga sangat dibutuhkan mulai dari tahap permohonan pendaftaran tanah oleh pihak yang berhak atas tanah atau yang dikuasainya diperlukan peran aktif dan ketelitian dari pihak BPN sebagai penyelenggara pendaftaran tanah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kantor pertanahan Kota Palu. Berbagai masalah yang muncul seperti adanya sertifikat ganda, penyerobotan lahan yang diikuti dengan tindakan penertiban sertifikat oleh pihak yang tidak berhak merupakan beberapa masalah pertanahan yang kerap muncul di masyarakat berkaitan dengan kegiatan pendaftaran tanah, dimana hal tersebut disebabkan antara lain oleh ketidaktahuan masyarakat tentang obyek tanah yang ternyata telah memiliki sertifikat,

kembali dimohonkan untuk diterbitkan sertifikatnya lagi (satu obyek tanah memiliki dua sertifikat). Hal ini terjadi karena masalah terbatasnya pengumuman kepada masyarakat oleh pihak BPN dari proses pendataan data fisik dan data yuridis sampai dengan penerbitan sertifikat.

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berpengaruh kepada orang dalam mencapai suatu tujuan, (Djauhari, 2008 : 27). Selanjutnya Winarno (2002: 37), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan itu ada kesamaan pandangan bahwa kebijakan publik adalah tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Kata pemerintah disini menjadi ciri khas yang membedakan kebijakan pemerintah dari kebijakan lainnya.

### **Model Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan pada umumnya diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintahan dalam rangka melakukan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Disamping itu, setiap pelaksanaan kebijaksanaan masih memerlukan pembentukan kebijaksanaan dalam wujud peraturan perundang-undangannya. Implementasi kebijakan publik biasanya akan terkait dengan aktor pelaksana dalam berbagai kedudukan dan peran. Para pelaksana kebijakan adalah para aktor yang satu dengan yang lainnya yang dibebankan dengan penggunaan sarana. Organisasi pelaksana meliputi keseluruhan para aktor pelaksana dan pembagian tugas masing-masing. Implementasi kebijakan publik sangat penting untuk memberikan perhatian yang khusus kepada peran dari kelompok-kelompok kepentingan (interest groups) yang bertindak

sebagai wakil pelaksanaan atau sebagai objek kebijaksanaan.

### **Indikator Implementasi Kebijakan**

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005) menjelaskan bahwa ada 6 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

#### **(1) Standar dan sasaran kebijakan**

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi.

#### **(2) Sumber daya**

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

#### **(3) Komunikasi antara organisasi dan penguatan aktivitas**

Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.

#### **(4) Karakteristik agen pelaksana**

Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

#### **(5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik**

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

#### **(6) Disposisi implementor**

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu : (1) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan (2) kognisi, yakni pemahamannya terhadap

kebijakan; (3) Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

### **Pengukuran Bidang Tanah**

Kebijakan pemerintah di bidang pertanahan yaitu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah berdasarkan PP 24/1997, pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional membuat perencanaan untuk menyelesaikan pembuatan Sertipikasi Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui Proyek Administrasi Pertanahan dengan pendekatan sistematis, yang dikenal dengan Proyek Ajudikasi. Proyek ini akan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk lapisan masyarakat golongan ekonomi lemah yang melakukan pendaftaran tanah.

Pengukuran Pendaftaran Tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum, pendaftaran tanah ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Dalam memenuhi kebutuhan ini pemerintah melakukan data penguasaan tanah terutama yang melibatkan para pemilik tanah. Pendaftaran tanah semula dilaksanakan untuk tujuan fiskal (*fiscal kadaster*) dan dalam hal menjamin kepastian hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai suatu lembaga pendaftaran tanah untuk pertama kalinya dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, dan baru berlaku 8 Oktober 1997, BPN (1989 : 3).

### **METODE**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris dan sistimatis.

Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis. Sugiyono, (2006 : 1).

### **Informan Penelitian**

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Menurut Siregar (2010 : 148) Purposive sampling adalah metode penetapan informen berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria yang dipilih dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Aparatur Sipil Negara di Kantor Pertanahan Kota Palu
- 2) Memiliki kompetensi di bidang Pertanahan khususnya SOP pengelolaan bidang tanah di Kantor Pertanahan.
- 3) Sudah bekerja di atas tiga tahun .pada kantor Pertanahan
- 4) Masyarakat yang pernah melakukan pendaftaran tanah di kantor Pertanahan Kota Palu.

Dari kriteria tersebut di atas, maka jumlah Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari : 1 orang Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, 2 orang Kepala Seksi di bidang Pengukuran tanah dan 2 orang masyarakat yang pernah melakukan pendaftaran tanah di kantor Pertanahan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian menggunakan teknik sebagai berikut :

- 1) Pengamatan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian, Judistira (2009 : 281)

- 2) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung pada responden, Maman (2007: 21).
- 3) Dokumentasi, yaitu mengambil data-data yang berhubungan dengan penelitian misalnya, jumlah pegawai, jumlah masyarakat yang mendaftarkan tanahnya dan struktur organisasi.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data yang menggunakan pendapat Miles dalam Faisal 2013 : 59

#### **1) Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan pengumpulan informasi yang disusun dan memberikan kemungkinan menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian berupa teks naratif, matriks dan bagan. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan data secara sistimatis agar lebih muda untuk dipahami.

#### **2). Reduksi Data**

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengorganisasikan data yang direduksi. Data tersebut mula-mula disajikan terpisah antara satu tahap dengan tahapan yang lain, tetapi setelah kategori terakhir direduksi, maka keseluruhan data dirangkum dan disajikan secara terpadu. Dengan melihat penyajian data, maka dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

#### **3) Penyajian Data**

Penafsiran makna data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut, setelah data sudah dikelompokkan maka langkah selanjutnya adalah menafsirkan data dari hasil wawancara dengan informan penelitian di Lapangan.

#### **4) Penyimpulan dan Verifikasi**

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang

jasas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.

#### **5) Kesimpulan Akhir**

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai. Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenarannya dan kesesuaannya sehingga kesahihan data terjamin. Pada tahap ini peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap dengan temuan baru dari temuan yang sudah ada.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi kebijakan dalam penelitian ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur Implementasi kebijakan Pengukuran Bidang Tanah dalam penelitian ini Sebagai Berikut:

#### **1) Standar dan sasaran kebijakan**

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi. berkaitan dengan standar dan sasaran kebijakan maka implementasi kegiatan pengukuran bidang tanah pada kantor pertanahan Kota Palu sudah berjalan namun belum maksimal, hal

ini diakui oleh ibu Dra. Herlina Lawasa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu yang diwawancarai pada hari Senin, tanggal 03 Desember 2018, pukul 10.00 – 11.05 WITA, sebagai berikut:

Mekanisme pengukuran bidang tanah di Kantor Pertanahan Kota Palu selama ini mengacu pada Juknis pengukuran PMNA No. 3 tahun 1997. Dimana dalam kegiatan pengukuran harus melibatkan pihak kelurahan dan pihak-pihak yang berbatasan. Adapun yang menjadi standar dalam pengukuran bidang tanah yaitu sebelum juru ukur melakukan pengukuran di lapangan maka pihak pemohon yang akan diukur tanahnya memasang patok tanda batas tentu melibatkan pihak-pihak yang berbatasan. Kemudian yang menjadi sasaran pengukuran bidang tanah yaitu bidang-bidang tanah yang dimohon oleh pemilik tanah untuk dilakukan pengukuran sesuai dengan asas kontradiktur delimitasi (Wawancara di ruang Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu).

Pendapat informan di atas dalam konteks implementasi kebijakan sudah berjalan sesuai standar secara prosedural dan sasaran, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli, Widodo (2007:22), bahwa setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan standar sebagai pedoman, petunjuk, tuntutan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu standar dan sasaran menjadi bagian dari mekanisme yang harus dijalankan dalam sebuah organisasi kelembagaan, yang nota bennya sebagai representasi negara dalam implementasi kebijakan yang baik dalam melaksanakan suatu regulasi kebijakan, khususnya menyangkut pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Palu.

### **Sumber daya**

Sumber daya dalam penelitian ini diartikan sebagai kemampuan yang menjadi

faktor-faktor yang menentukan keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengukuran bidang tanah <sup>selama</sup> ini di Kantor Pertanahan Kota Palu. Untuk mewujudkan rencana program dalam implementasi kebijakan ini maka penting untuk memahami persoalan-persoalan inti yang terdapat dalam program tersebut. Dengan demikian suatu rencana program yang baik, bukan saja penting dalam hal mengembangkan peluang-peluang yang ada, akan tetapi seringkali menghadapi aneka macam persoalan operasional. Oleh karena itu yang paling penting adalah pengaturan sumber daya yang diperlukan yaitu Aparatur Sipil Negara, jumlah dana dan fasilitas-fasilitas yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam konteks Implementasi Kebijakan kegiatan Pengukuran bidang tanah selama ini di Kantor Pertanahan Kota Palu, indikator yang digunakan dalam mengukur Sumber Daya dalam penelitian ini yaitu:

Penambahan informasi mengenai kegiatan Pengukuran bidang tanah yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Palu pada faktor Sumber Daya berikut ditampilkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Bapak Simarlin, SST sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kota Palu pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018, pukul 11.18 – 12.00 WITA, sebagai berikut:

*“Mengenai kemampuan Sumber Daya Manusia di Kantor Pertanahan Kota Palu saya yakin dan percaya mereka cukup mumpuni karena pendidikan mereka ada yang D3 bahkan ada yang S1. Namun pegawai disana sepertinya belum punya komitmen untuk melaksanakan program Pengukuran bidang tanah dengan baik. Untuk sarana dan prasarana di kantor menurut penglihatan saya, bisa dikatakan belum memadai. Namun itu hendaknya jangan dijadikan alasan dalam pekerjaan seperti melakukan proses Pengukuran bidang tanah.”* (Wawancara dilakukan di Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kota Palu).

Hasil wawancara peneliti dengan informan di atas dapat dikatakan bahwa

sumber daya Pengukuran bidang tanah di Kantor Pertanahan Kota Palu belum memadai. Konteks kemampuan Aparat Sipil Negara belum sesuai dengan harapan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli, Widodo, (2007: 22) mengemukakan bahwa setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan Standar Operasi Prosedur sebagai pedoman, petunjuk, tuntutan dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar pegawai mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya dan hasil apa yang diinginkan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu Standar Operasi Prosedur menjadi bagian dari mekanisme kegiatan Pengukuran bidang tanah yang harus dijalankan dalam sebuah institusi pemerintahan.

### **Komunikasi**

Komunikasi dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu sarana yang efektif untuk melaksanakan aktivitas, baik dalam organisasi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan komunikasi di Kantor Pertanahan Kota Palu pada Pengukuran bidang tanah dikatakan sudah memadai

Berkaitan dengan komunikasi kegiatan Pengukuran bidang tanah di Kantor Pertanahan Kota Palu maka hasil wawancara penulis dengan bapak Bambang Yudho Setyo, ST selaku Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Palu yang diwawancarai pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, pukul 10.10 – 11.17 WITA sebagai berikut:

Komunikasi berupa sosialisasi oleh Kantor Pertanahan Kota Palu berkaitan dengan kegiatan Pengukuran bidang tanah kepada masyarakat belum maksimal. Biasanya sosialisasi kegiatan Pengukuran bidang tanah digabung dengan kegiatan Prona atau kegiatan lainnya. Itupun kadang ada kadang tidak, jadi dapat dikatakan belum maksimal sehingga masyarakat kalau ingin tau tentang kegiatan Pengukuran bidang tanah

masyarakat harus ke Kantor Pertanahan Kota Palu. (Wawancara di Ruang Kerja Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Palu).

Berkaitan dengan komunikasi yang digunakan mengukur implementasi kebijakan, Thoha (2010 : 300) berpendapat apabila pegawai memiliki keterampilan dan pengetahuan pelayanan masyarakat maka akan lebih mudah untuk melakukan sosialisasi. Kualitas pegawai dalam melakukan sosialisasi relatif lebih mudah dibentuk dan dikembangkan melalui peran belajar dan pelatihan yang relatif singkat. Sebaliknya peran institusi dalam sosialisasi, citra diri dan motif tidak mudah dan lebih sulit untuk diidentifikasi serta membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memperbaiki atau mengembangkan hasil pekerjaan sosialisasi tersebut.

### **Karakteristik Pelaksana Kebijakan**

Karakteristik dalam penelitian ini yaitu sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan masyarakat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Berkaitan dengan karakteristik pelaksana kebijakan kegiatan Pengukuran bidang tanah di Kantor Pertanahan Kota Palu dikatakan sudah memadai hal ini diakui oleh Bapak Bambang Yudho Setyo, ST. selaku Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Palu pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, pukul 10.10 – 11.17 WITA sebagai berikut:

Pelaksanaan Pengukuran bidang tanah tentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian mengenai hambatan yang dihadapi yaitu tenaga /personil di kantor saya rasa masih kurang begitupun dengan sarana dan prasarana belum memadai sehingga itu mempengaruhi kecepatan proses dalam pelaksanaan pengukuran bidang tanah atau dalam proses penerbitan sertifikat tanah. Disamping itu terkadang dikalangan masyarakat yang terjadi adalah mereka mengurus surat-surat tanahnya

hanya pada saat mau mengurus sertipikat dan bahkan dokumen yang dimilikinya tidak lengkap, batas tanahnya tidak jelas, tentunya ini menjadi hambatan dalam proses pelayanan oleh Kantor Pertanahan. (Wawancara di ruang Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Palu).

### **Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik**

Kondisi sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pengukuran bidang tanah di Kota Palu tentu dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi dan politik.

Hal ini diakui oleh Bapak Dubi Sastrawan sebagai masyarakat Kelurahan Lambara Kecamatan Tavaili Kota Palu pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018, Pukul 09.25 – 10.55 WITA, sebagai berikut: *Pengukuran bidang tanah di Kota Palu dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan Pengukuran bidang tanah yang ditanggung oleh Negara hanya biaya transportasi saja. Untuk masyarakat yang mengurus sertifikat tanah dalam Pengukuran bidang tanah tentu harus membayar segala macam administrasi. Kemudian faktor sosial dapat mempengaruhi pelaksanaan program Pengukuran bidang tanah seperti adanya konflik batas antara desa/kelurahan. Selain itu masyarakat lokal masih menganggap sertifikat tanah tidak penting. (Wawancara di rumah informan di Kota Palu).*

Pendapat Informan Di Atas Dapat Dikatakan Bahwa Pelaksanaan Suatu Kebijakan Dalam Program Pengukuran Bidang Tanah Selalu Dipengaruhi Oleh Faktor Ekonomi, Sosial Dan Politik. Standar Operasi Prosedur. Yang Telah Ditetapkan Dalam Pengukuran Bidang Tanah Merupakan Aturan, Norma-Norma, Dan Pola-Pola Hubungan Yang Terjadi Berulang-Ulang Dalam Instansi Pemerintahan Yang Mempunyai Hubungan Nyata Dengan Apa Yang Mereka Miliki Dalam Menjalankan

Kebijakan. Suatu Kebijakan Program Pengukuran Bidang Tanah Yang Baik Seringkali Melibatkan Beberapa Lembaga Atau Organisasi Dalam Proses Implementasi Kebijakan Dan Harus Memperhatikan Faktor Ekonomi, Sosial Dan Politik.

### **Disposisi Implementor**

Disposisi Implementor Mencakup Tiga Hal Penting, Yaitu: (1) Respons Implementor Terhadap Kebijakan (2) Kognisi, Yakni Pemahamannya Terhadap Kebijakan; (3) Intensitas Disposisi Implementor

Berkaitan dengan pengukuran bidang tanah di Kota Palu maka hasil wawancara penulis dengan bapak Dubi Sastrawan sebagai masyarakat Kelurahan Lambara Kecamatan Tavaili Kota Palu pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018, Pukul 09.25 – 10.55 WITA, sebagai berikut:

*Adanya Program pengukuran bidang tanah di Kota Palu sebenarnya diterima baik dan didukung oleh masyarakat. Hal ini bisa dibuktikan dengan harapan-harapan masyarakat yang menginginkan agar program pengukuran bidang tanah ini dapat memberikan biaya yang murah dan prosesnya lebih cepat. Namun demikian memang kami sadari dengan keterbatasan yang kami hadapi sehingga pelayanan pengukuran bidang tanah di Kantor Pertanahan Kota Palu belum maksimal. (Wawancara di ruang Kantor Pertanahan Kota Palu).*

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara peneliti dengan informan di atas dapat dikatakan bahwa implementasi program rumah informan di Kota Palu di Kantor Pertanahan Kota Palu yang berkaitan faktor disposisi belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dan hasil penelitian penulis yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Palu. Maka dapat dipahami bahwa dalam konteks Program Larasita belum sesuai dengan harapan masyarakat. Hal tersebut senada dengan pendapat ahli, Widodo, (2007: 22) bahwa setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan



Standar Operasi Prosedur sebagai pedoman, petunjuk, tuntutan dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar pegawai mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya dan hasil apa yang diinginkan dari pelaksanaan kebijakan.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti tentang implementasi kebijakan pengukuran bidang tanah di Kota Palu disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengukuran bidang tanah sudah berjalan dengan baik, dengan rincian sebagai berikut: Implementasi kebijakan pengukuran bidang tanah di Kota Palu dilihat dari faktor standar dan sasaran kebijakan sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari implementasi kebijakan pengukuran bidang tanah sudah menjangkau masyarakat kelurahan yang jauh dari Kota Palu.

Implementasi kebijakan pengukuran bidang tanah di Kota Palu dilihat dari faktor Sumber Daya belum memadai hal ini terlihat dari sarana dan prasarana belum cukup serta jumlah Aparatur Sipil Negara yang masih kurang di Kantor Pertanahan Kota Palu. Kemudian Implementasi kebijakan pengukuran bidang tanah di Kota Palu dilihat dari faktor komunikasi, karakteristik, kondisi sosial ekonomi dan politik serta faktor disposisi belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari fasilitas yang disediakan belum memadai serta didukung hasil wawancara dengan informan di lokasi penelitian yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan pengukuran bidang tanah belum berjalan dengan baik.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini maka diharapkan kepada Pengambil Keputusan di Kantor Pertanahan Kota Palu agar melaksanakan kebijakan

pengukuran bidang tanah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Juknis pengukuran PMNA No. 3 tahun 1997.

Dihimbau kepada Kantor Pertanahan Kota Palu agar memperhatikan faktor Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi, Karakteristik dan Disposisi sehingga pegawai Kantor Pertanahan Kota Palu lebih aktif merespon masyarakat yang mengurus administrasi pertanahan melalui pengukuran bidang tanah.

Disarankan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu dalam menyelenggarakan Program pengukuran bidang tanah kepada masyarakat di kelurahan agar melibatkan Pemda Kota Palu sehingga apabila ada permasalahan dalam administrasi pertanahan dapat diselesaikan dengan bijaksana.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Ekowati. 2007. *Perumusan Kebijakan Publik*, Edisi 7 Penerbit Gramedia Jakarta
- Islamy 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional
- Pertanahan Di Kota Palu *Tesis Pascasarjana Universitas Tadulako Palu*.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 6. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.
- Thoha. Miftah. 2010. *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*. Kencana. Jakarta
- Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, 2010, penerbit Belabook Media, Jakarta